

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup manusia berbeda-beda, tak terbatas dan selalu berubah-ubah serta cenderung bertambah setiap waktu. Sehingga mendorong setiap individu untuk berusaha dengan keras agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan, hal itu karena terbatasnya kemampuan dan ketatnya persaingan.

Menurut Kartono dalam Arsono (2014) di era globalisasi ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melaju dengan pesat sehingga menimbulkan semakin pesatnya persaingan yang ada. Globalisasi berdampak pada semakin mudahnya seseorang masuk dan keluar ke dalam suatu daerah berimplikasi pada masuknya budaya-budaya asing ke dalam negeri. Besarnya pengaruh invasi budaya yang masuk membawa beberapa nilai-nilai baru sedikitnya mempengaruhi nilai-nilai yang telah berlaku di masyarakat. Nilai-nilai baru yang masuk membawa beberapa perubahan terhadap perilaku masyarakat. Tak terkecuali nilai-nilai negatif yang datang menyebabkan keresahan dalam masyarakat seperti hedonism dan matrealisme. Keinginan pemenuhan kebutuhan yang melimpah seseorang jika tidak diiringi dengan kemampuan atau *skill* yang baik maka akan sulit untuk mencapai kebutuhan materi yang diinginkan sehingga memaksa seseorang untuk

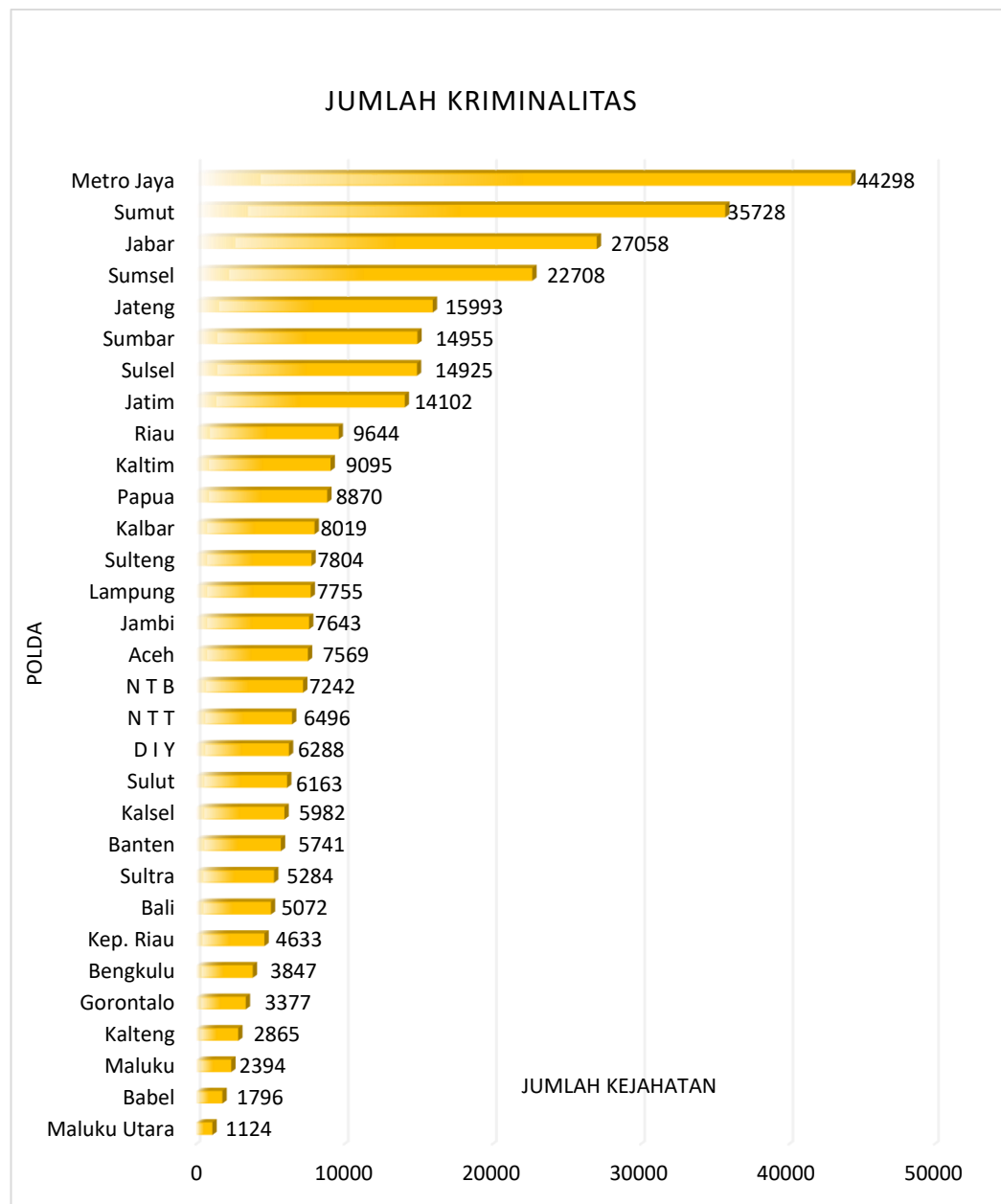
mendapatkannya dengan cara illegal atau tidak wajar yang termasuk dalam sebuah tindak kejahatan.

Kriminalitas atau kejahatan berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Kriminalitas kian berkembang baik dari segi jumlah atau bentuknya, terutama terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Daerah perkotaan merupakan pusat terjadinya tindak kriminal hal ini terjadi karena di daerah perkotaan terjadi persaingan yang ketat karena daerah perkotaan menjadi pusat kegiatan perokonomian di suatu wilayah sehingga setiap orang dituntut untuk dapat bersaing dengan keras sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, daerah perkotaan juga merupakan tujuan para pencari kerja yang datang dari daerah pedesaan. Arus urbanisasi yang tinggi menyebabkan daerah perkotaan menjadi wilayah padat penduduk. Semakin padat suatu daerah maka akan menimbulkan tingginya bentuk persaingan antar individu maupun kelompok, hal itu akan semakin memicu terjadinya tindak kejahatan.

Selama periode tahun 2011–2014, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia berfluktuasi. Catatan di Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2011 sebanyak 347.605 kasus, menurun menjadi sebanyak 341.159 kasus pada tahun 2012 dan kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 342.084 kasus. Pada tahun 2014 kasus kriminalitas menurun menjadi 325.317 kasus. Sementara itu, jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 134 orang pada tahun 2012, 140 orang pada tahun 2013 dan 131 orang pada tahun 2014. (BPS, 2015)

Berdasarkan Gambar 1.1 jumlah kejahatan untuk provinsi/polda selama tahun 2014 terlihat bahwa Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak yaitu 44.298 kasus, kemudian diurutkan kedua adalah Polda Sumatera Utara sebanyak 35.728 kasus, dan Jawa Barat 27.058 kasus. Sedangkan Polda Maluku, Kep. Bangka Belitung, dan Maluku Utara jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 2.394, 1.796, dan 1.124, merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit. Perlu menjadi catatan bahwa jumlah kejahatan bisa sangat dipengaruhi dengan banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah.

Gambar 1. 1 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Polda tahun 2014



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Kriminalitas yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia seringkali diakibatkan oleh kepadatan penduduk akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah karena tingginya arus urbanisasi, pembangunan yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah, tingkat

pendidikan yang rendah, ketimpangan pendapatan, banyaknya pengangguran dan lain sebagainya. Baik secara nasional maupun daerah, kriminalitas yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia disebabkan oleh hal yang sama, begitu juga dengan tingkat kriminalitas yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Gambar 1.1 ditunjukkan bahwa jumlah kejahatan yang dilaporkan kepada Polda di Daerah Istimewa Yogyakarta ada sejumlah 6.288 kasus kejahatan atau kriminalitas selama periode tahun 2014. Jika dilihat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, jumlah kriminalitas yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2013 sebanyak 6.873 kasus, tahun 2014 sebanyak 6.288 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 7195 kasus. (BPS, 2016)

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta, 2013-2015

No	Jenis Kejahatan	Tahun			Jumlah
		2013	2014	2015	
1	Pencurian dengan pemberatan	872	741	759	2372
2	Pencurian kendaraan bermotor	743	608	562	1913
3	Pencurian dengan kekerasan	174	212	234	620
4	Pencurian ringan-biasa	671	622	770	2063
5	Penganiayaan ringan	398	451	470	1319
6	Penganiayaan berat	44	48	56	148
7	Pembunuhan	12	10	8	30
8	Perkosaan	21	21	23	65
9	Kenakalan remaja	12	20	13	45
10	Mata uang palsu	3	1	2	6
11	Narkotika	336	389	426	1151
12	Perjudian	137	87	135	359
13	Pemerasan-ancaman	57	47	76	180
14	Penculikan	4	7	16	27
15	Penipuan-curang	1403	1296	1698	4397

No	Jenis Kejahatan	Tahun			Jumlah
		2013	2014	2015	
16	Penadahan	4	1	3	8
17	Pengrusakan	127	110	114	351
18	Penggelapan	539	565	652	1756
19	Aksi mogok	0	0	0	0
20	Kejahatan lainnya	1316	1052	1178	3546
Jumlah		6873	6288	7195	

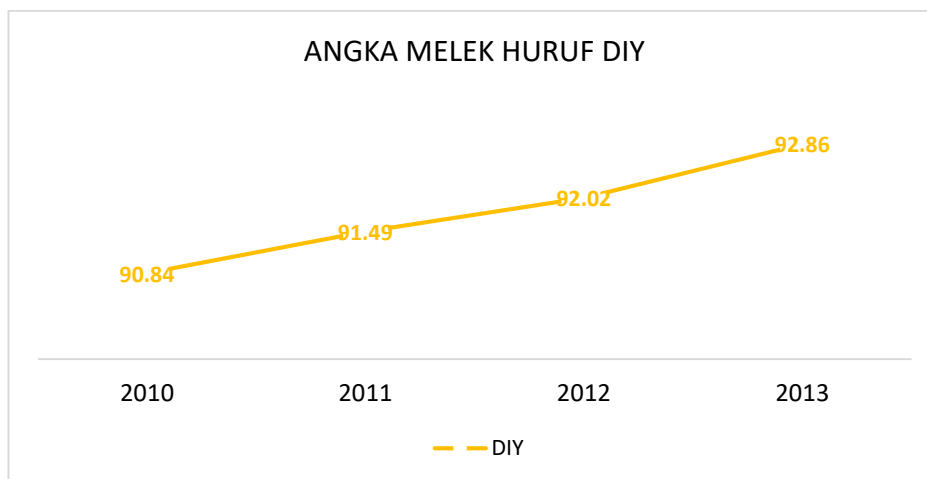
Sumber : BPS Provinsi DIY

Berdasarkan Tabel 1.1, Daerah Istimewa Yogyakarta selama tiga periode yaitu tahun 2013-2015, jumlah kejahatan yang dilaporkan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 yaitu sebesar 6.873 kasus, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 dengan jumlah 6.288 kasus, lalu pada tahun 2015 mengalami kenaikan cukup banyak yaitu 7.195 kasus yang dilaporkan pada Polda DIY. Tabel 1.1 juga menunjukkan jumlah kejahatan berdasarkan jenis kejahatan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 20 jenis kejahatan yang ada terlihat bahwa kejahatan pencurian secara keseluruhan baik itu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian ringan atau biasa dari tiga tahun terakhir selalu lebih tinggi dari jenis kejahatan lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dijumlahkan maka tingkat kejahatan pencurian di DIY selama periode tahun 2013-2015 mencapai 6.968 kasus pencurian. D.I. Yogyakarta sebagai kota pendidikan tidak menjadi suatu jaminan bahwa kejahatan yang terjadi akan rendah terutama terkait dengan kejahatan pencurian yang selalu tinggi dibandingkan jenis kejahatan lain dimana pencurian merupakan indikasi bahwa

adanya kebutuhan ekonomi seseorang yang tidak dapat ia penuhi sehingga memaksanya menempuh jalan yang tidak wajar untuk memenuhinya.

Meningkatnya tindak kejahatan pencurian dari tahun ke tahun seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Sullivan (2007) cara yang dapat digunakan untuk menekan angka kejahatan adalah dengan hukuman atau dengan meningkatkan upah pendapatan. Salah satu cara untuk meningkatkan upah pendapatan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta ialah dengan meningkatkan kualitas pendidikan penduduknya.

Gambar 1. 2 Angka Melek Huruf Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2013

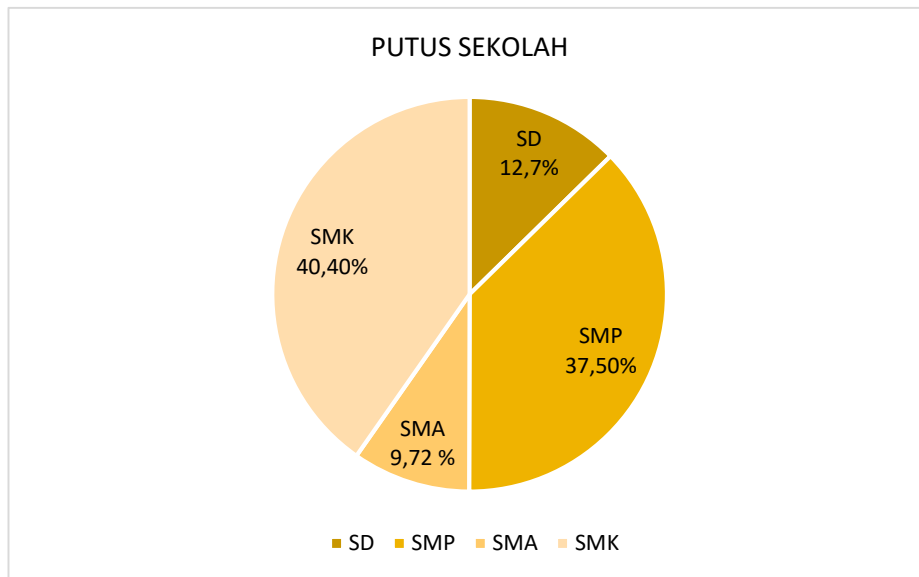


Sumber : BPS Provinsi DIY

Kualitas pendidikan salah satunya dapat dilihat melalui Angka Melek Huruf (AMH). Perkembangan AMH penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013, AMH Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka 92,86 persen, artinya 92,86 persen proporsi penduduk 15 tahun ke atas telah bisa dan mengerti baca-tulis. Selain itu angka

melek huruf juga dipengaruhi oleh banyaknya murid yang putus sekolah di suatu daerah terutama pada jenjang sekolah dasar.

Gambar 1. 3 *Persentase Murid Putus Sekolah menurut Jenjang Sekolah di D.I. Yogyakarta, 2015*



Sumber : BPS Provinsi DIY

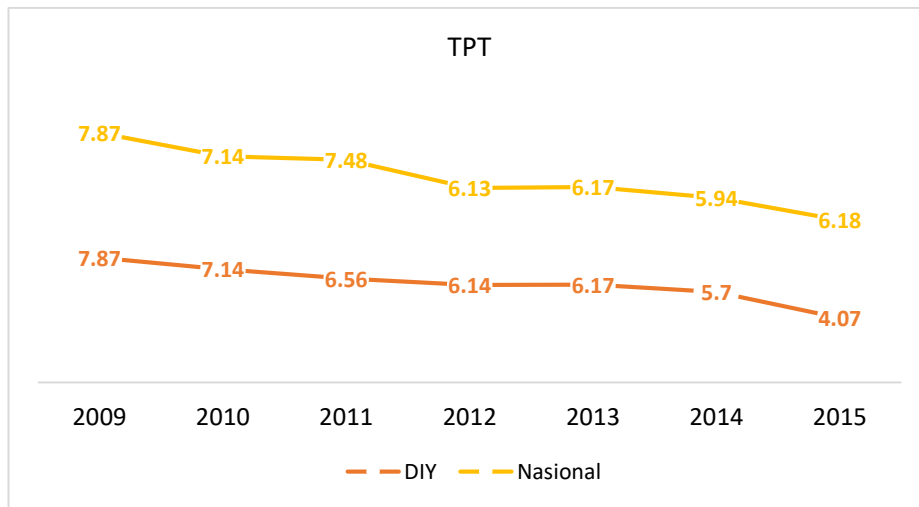
Persentase murid putus sekolah di D.I. Yogyakarta pada tahun 2015 paling tinggi terjadi pada jenjang SMK, kemudian disusul pada tingkat SMP, lalu SMA kemudian paling kecil yaitu pada tingkat Sekolah Dasar. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2015 dari total 792 murid putus sekolah paling tinggi disumbang oleh Kulon Progo yaitu dengan jumlah 240 murid, kemudian Kota Yogyakarta dengan 190 murid, Gunungkidul dengan 136 murid, Bantul dengan 121 murid dan paling sedikit yaitu dari Sleman dengan 105 murid putus sekolah. Pada tahun sebelumnya jumlah murid putus sekolah lebih tinggi yaitu 887 murid. Semakin banyak angka putus sekolah mengakibatkan semakin banyak pula penduduk dengan pendidikan rendah. Semakin rendah pendidikan

mengakibatkan kualitas sumber daya manusia semakin rendah pula. Penduduk dengan pendidikan rendah cenderung memiliki waktu luang lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk pendidikan tinggi. Menurut Lochner (2007) banyaknya waktu luang yang ada dapat memberikan kesempatan untuk melakukan tindak kriminal.

Keterbatasan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimiliki. Sehingga sulit bagi mereka yang berpendidikan rendah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dengan layak. Dengan alasan itu maka seseorang akan bertindak dengan segala cara untuk mendapatkan dambaan pemuas kebutuhan. Di tengah globalisasi yang dipenuhi oleh gaya hidup materialistis dan hedon maka bukan tidak mungkin seseorang akan melakukan hal ilegal atau tidak wajar untuk mendapatkan uang, yaitu salah satunya dengan cara mencuri.

Jika penduduk tidak dapat memperoleh pekerjaan maka akan berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran. Menurut Wong dalam Hardianto (2009) dalam penelitiannya disimpulkan bahwa tingkat pengangguran mempunyai dampak signifikan terhadap tingkat kriminalitas suatu wilayah. Tingkat pengangguran di suatu wilayah dapat dilihat dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) wilayah tersebut. Selama periode tahun 2009-2015 tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam Gambar 1.4.

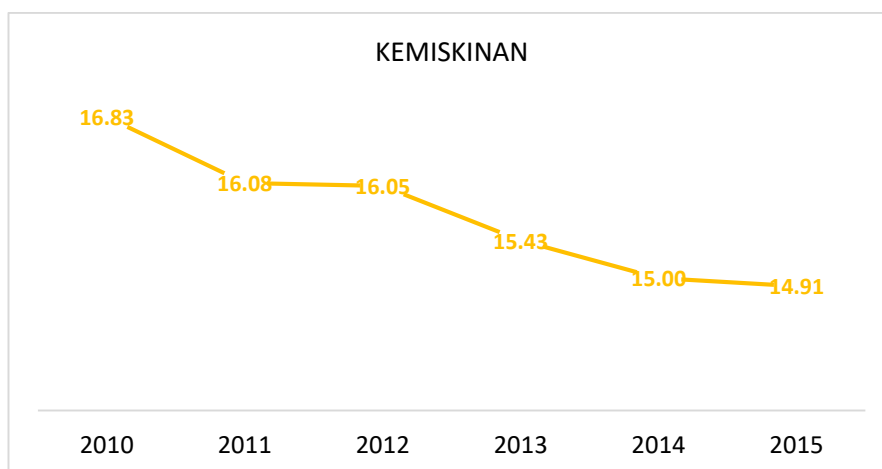
Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka DIY dan Nasional, 2009-2015



Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami penurunan. Dibandingkan dengan TPT nasional, TPT Daerah Istimewa Yogyakarta masih relatif lebih rendah. Menurunnya tingkat pengangguran seharusnya dapat menurunkan tingkat kejahatan pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara dari tiga tahun terakhir yaitu tahun 2013-2015 kejahatan pencurian mengalami fluktuasi. Pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan seseorang rendah. Pendapatan yang rendah secara berkelanjutan akan menyebabkan kemiskinan. Miskin berarti memiliki pendapatan yang lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak atau kemampuan pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.

Gambar 1. 5 *Persentase Penduduk Miskin di D.I. Yogyakarta, 2010-2015*

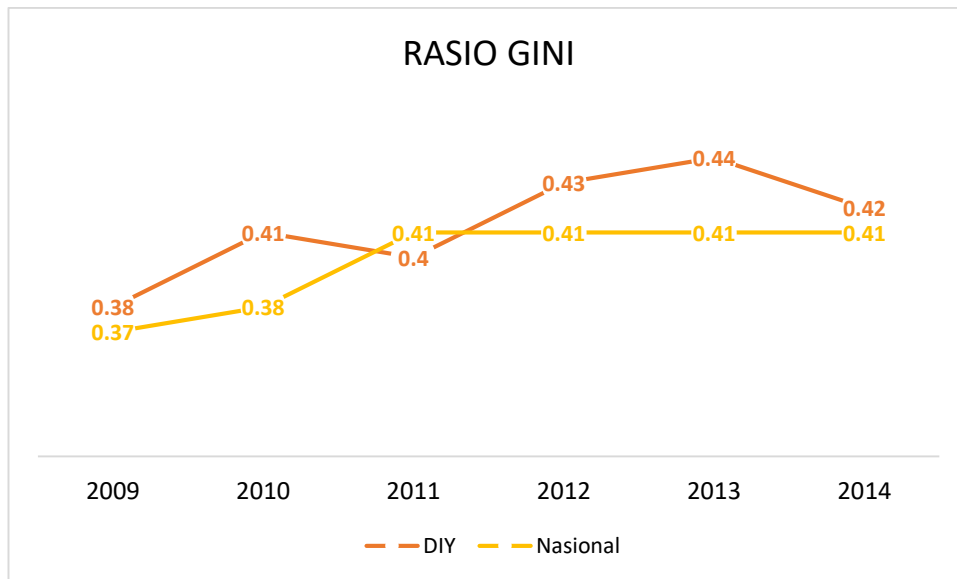


Sumber : BPS Provinsi DIY

Persentasi penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2010 sampai dengan 2015 mengalami penurunan. Penurunan penduduk miskin sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran. BPS Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat pada 2015 garis kemiskinan sebesar Rp. 335.886 perkapita per bulan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 550,23 ribu orang. Kemiskinan seringkali menumpuk di daerah perkotaan, di Daerah Istimewa Yogyakarta penduduk miskin tersebar di daerah perkotaan sejumlah 329,65 ribu dan di daerah pedesaan sebesar 220,57 ribu orang. Besarnya jumlah penduduk miskin di perkotaan mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk.

Ketimpangan distribusi pendapatan penduduk sering diukur dengan menggunakan indikator Rasio Gini.

Gambar 1. 6 Perkembangan Rasio Gini DIY dan Nasional, 2009-2014



Sumber : BPS Provinsi DIY

Dari Gambar 1.6 Rasio Gini Daerah Istimewa Yogyakarta berfluktuasi. Ketimpangan paling tinggi antara tahun 2009-2015 terjadi pada tahun 2013 dengan rasio 0.44 namun masih berada dalam kategori ketimpangan sedang. Secara umum dibandingkan dengan Rasio Gini nasional, Rasio Gini Daerah Istimewa Yogyakarta masih relatif lebih tinggi. Artinya ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi daripada ketimpangan yang dihitung secara nasional. Ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial tersebut apabila diikuti dengan sulitnya mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan secara layak akan memicu penyimpangan prilaku yaitu melakukan hal yang tak wajar untuk mendapatkan materi yang dibutuhkan, salah satunya yaitu tindak pencurian.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Maulana (2014) dengan menggunakan variabel umur, pendidikan, pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga memiliki pengaruh terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang studi kasus di LP Klas I Kedungrame. Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dalam penelitian yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan menggunakan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran serta tingkat ketimpangan distribusi pendapatan untuk mengukur seberapa jauh pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan pencurian yang terjadi di wilayah ini.

Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai kota pendidikan atau kota pelajar. Dengan tingkat pendidikan yang baik, yaitu dilihat dari nilai AMH yang hampir mencapai seratus persen, kemudian semakin turunnya tingkat pengangguran, serta ketimpangan distribusi pendapatan yang termasuk kedalam kategori sedang, tidak menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta bebas dari tindak kejahatan terutama kejahatan pencurian yang dari tiga tahun terakhir menempati jumlah kejahatan paling banyak. Tindak kejahatan pencurian mengindikasikan adanya ketidaksejahteraan kehidupan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan prasurvey yang peneliti lakukan ke Kepolisian Daerah (Polda) DIY, bahwa pencurian yang dilakukan oleh pelaku sebagian besar didasari oleh kebutuhan ekonomi.

Semakin tingginya tingkat kejahatan pencurian yang terjadi seharusnya mendorong pemerintah, terutama pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengambil suatu kebijakan. Berdasarkan ulasan di atas, penulis tertarik untuk

meneliti lebih dalam mengenai bagaimana keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi perkembangan tingkat pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara khusus penulis mengambil judul penelitian “Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan agar penelitian ini tidak meluas, tetap terarah dan terfokus, maka penulis membatasi penelitian ini, yaitu tingkat pendidikan dilihat dari angka melek huruf (AMH) penduduk berusia 15 tahun ke atas, tingkat pengangguran diambil dari jumlah pengangguran penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja dan rasio gini setiap kabupaten atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tingkat kejahatan pencurian yang meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan-biasa dengan cakupan wilayah di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan 2015 yang telah masuk dan dilaporkan kepada polisi.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah memuat permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang telah disinggung dan diuraikan pada latar belakang penelitian. Berdasar dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perubahan indikator pada variabel tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010-2015.
2. Apakah perubahan indikator pada variabel tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010-2015.
3. Apakah perubahan indikator pada variabel Rasio Gini berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010-2015.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah variabel pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010-2015.
2. Untuk mengetahui apakah variabel pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010-2015.
3. Untuk mengetahui apakah variabel Rasio Gini berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010-2015.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan dan mengambil keputusan bagi yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.
2. Sebagai acuan akademik bagi mahasiswa dan koleksi perpustakaan yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penelitian.
3. Sebagai bahan kajian bagi penelitian sehingga dapat memperluas wawasan yang berhubungan dengan masalah kriminalitas terutama mengenai tindak pidana pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta.